

EVALUASI KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN HIBURAN TAHUN 2008-2012

Devi Yustri Yeni¹
Putu Ery Setiawan²

¹Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: deviyustriyeni@gmail.com / telp: +62 81 916 384 048

²Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar ditinjau dari perspektif ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan dengan menggunakan konsep *Value for Money*.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik analisis data kuantitatif berdasarkan perhitungan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil analisis berdasarkan kriteria penilaian yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, menunjukkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar berdasarkan konsep *Value for Money* atas penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan Tahun 2008-2012 rata-ratanya dapat dikategorikan ekonomis, sangat efisien, dan sangat efektif. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar sehingga mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dari tahun ke tahun adalah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kata kunci: *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Value for Money, Ekonomis, Efisiensi, dan Efektifitas*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the financial performance Revenue Office Denpasar viewed from the perspective of the economy, efficiency, and effectiveness of tax revenue the hotel, restaurant, and entertainment by using the concept of Value for Money. This study uses secondary data with quantitative data analysis techniques based on the calculation of the ratio of economy, efficiency, and effectiveness. Results of the analysis based on the assessment criteria based on the Decree of the Minister of Home Affairs No. 690.900-327 about Financial Assessment Guidelines, demonstrate the performance of Regional Revenue Office Denpasar based on the concept of Value for Money hotel tax revenue, restaurant, and entertainment year average 2008-2012 can be categorized economical, highly efficient, and very effective. Efforts undertaken Denpasar Regional Revenue Office so that increased revenue (PAD) significantly from year to year is to issue a policy in the field of local taxes and levies.

Keywords: *Regional Revenue (PAD), Value for Money, Economic, Efficiency, and Effectiveness*

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik saat ini perlu memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan, sehingga

penggunaan biaya harus lebih efisien. Menurut Mardiasmo (2002:127) *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. *Value for Money (VFM)* merupakan penilaian kinerja keuangan organisasi sektor publik yang dibagi menjadi dua bagian indikator, yaitu indikator biaya (ekonomi dan efisiensi), dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas).

Denpasar sebagai ibu kota provinsi Bali, tentunya segala kegiatan bisnis berpusat disini, tidak terkecuali bisnis hotel, restoran, dan hiburan. Jumlah pendirian hotel, restoran, dan hiburan yang terus meningkat. Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar (2012) menyatakan bahwa jumlah wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan mengalami peningkatan dari tahun 2008-2012. Penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Denpasar. Data komponen pajak daerah Kota Denpasar tahun 2008-2012 memperlihatkan bahwa perkembangan penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 di Amerika tidak mengurangi kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara sehingga tidak menurunkan pendapatan dari hotel, restoran dan tempat hiburan yang ada di Kota Denpasar tersebut. Berikut ini disajikan mengenai data target dan realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan yang merupakan sumber terbesar penerimaan pajak daerah Kota Denpasar.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan
Kota Denpasar Tahun 2008 – 2012 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Restoran		Pajak Hiburan	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2008	50.000	58.171	17.000	21.098	3.500	4.228
2009	62.250	75.936	21.750	25.207	4.250	5.123
2010	71.000	82.916	27.500	32.545	5.400	6.296
2011	80.500	92.200	33.500	39.328	6.300	6.964
2012	92.500	103.899	42.500	46.090	6.500	9.259

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, 2008 – 2012

Berdasarkan target dan realisasi pajak hotel, restoran, dan hiburan Kota Denpasar tahun 2008-2012 memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan selalu dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pencapaian maksimal dari target yang telah ditetapkan tersebut belum tentu mencerminkan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang merupakan tiga elemen utama dari *value for money*, karena kinerja sektor publik bersifat multidimensional sehingga tidak ada indikator tunggal untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif (Nugrahani, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh eka (2009) meneliti kinerja keuangan berdasarkan *value for money* untuk penerimaan pajak daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun anggaran 2004-2008. Penelitian dilakukan dengan teknik rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas. Hasil dari rasio ekonomi tidak ekonomis karena berada pada interval 100 persen, berdasarkan rasio efisiensi sangat efisien, berdasarkan rasio efektivitas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem telah efektif.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kota Denpasar dengan menggunakan konsep *value for money audit* yang difokuskan pada ekonomis, efisien, dan efektivitas. Masyarakat menghendaki adanya pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kinerja sektor publik, termasuk kinerja pemerintah daerah Kota Denpasar, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat dirumuskan untuk penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar ditinjau dari perpektif ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk pajak hotel, restoran, dan hiburan dengan menggunakan konsep *Value for Money*?
- b. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar sehingga mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan dari tahun ke tahun?

c. Tinjauan Pustaka

Kinerja Sektor Publik

Tingkat keberhasilan kinerja suatu organisasi akan diketahui dengan dilakukannya pengukuran seluruh aktivitas yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Menurut Mardiasmo (2002:121) terdapat tiga alasan mengapa pengukuran kinerja sektor publik penting untuk dilakukan. Pertama, maksud pengukuran kinerja sektor publik adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, sumber daya dan pembuatan keputusan dapat dialokasikan melalui

pengukuran kinerja sektor publik. Ketiga, adanya pertanggungjawaban publik dan membaiknya komunikasi kelembagaan dapat terwujud melalui pengukuran kinerja sektor publik.

Pemilihan metode penilaian kinerja pemerintah harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas serta harus dapat dengan mudah diaplikasikan terutama kesesuaiannya terhadap laporan yang telah dibuat oleh setiap program atau kegiatan pemerintah (Theresia, 2010). Tujuan utama penilaian kinerja adalah agar setiap karyawan dalam mencapai sasaran organisasi termotivasi dan dapat mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mendapatkan hasil yang sesuai (Mulyadi, 2001:415).

Pengertian *Value for Money Audit*

Sistem pemeriksaan diperlukan demi terjaminnya pertanggungjawaban publik oleh lembaga pemerintah. Sistem pemeriksaan yang dimaksud tidak sekedar *conventional audit*, tapi perlu dilakukan *value for money audit*. Dalam pemeriksaan yang konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan. Pendekatan baru ini, selain audit keuangan dan kepatuhan perlu dilakukan audit kinerja yang meliputi; audit ekonomi, efisiensi, efektivitas.

Definisi *Value For Money* berdasarkan *Audit Commision* dalam *Final Report* yang disampaikan oleh ITAD, dalam jurnal berjudul *Measuring the Impact and Value For Money of Governance & Conflict Programmes* (Chris Barnett, *et al.* : 2010) mengungkapkan bahwa *value for money* adalah tentang memperoleh manfaat maksimal dari waktu ke waktu dengan sumber daya yang tersedia. *Value*

for money adalah tentang mencapai keseimbangan yang tepat antara ekonomi, efisiensi dan efektivitas, atau menghabiskan sedikit, menghabiskan dengan baik dan menghabiskan uang dengan bijaksana. Pengertian masing-masing dari elemen *value for money* adalah sebagai berikut:

a. Ekonomi

“Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif”. (Indra Bastian 2006 : 77). Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi adalah.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk Memungut Pajak}}{\text{Anggaran Biaya untuk Memungut Pajak}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Sumber : Akmenika UPY, Volume 1 (Nugrahini, 2007)

Kriteria ekonomis penilaian kinerja keuangan yang dinyatakan oleh Mahsun (2009:186) dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.
Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan

Tingkat Kinerja Ekonomis	Kriteria
Di atas 100 %	Tidak ekonomis
Sama dengan 100 %	Ekonomis berimbang
Di bawah 100 %	Ekonomis

Sumber: Mahsun, 2009

b. Efisiensi

“Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan”. (Indra

Bastian, 2006:77). Penilaian rasio efisiensi dengan angka acuan tertentu harus dibandingkan di dua unit kerja. Apabila penilaian rasio efisiensi disuatu unit lebih besar dibandingkan dengan hasil rasio program yang sama di unit kerja lain, maka program tersebut dapat dikatakan lebih efisien. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, formulasinya adalah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \dots\dots(2)$$

Sumber : *Akuntansi Sektor Publik (Halim, 2008)*

Kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Lebih dari 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

c. Efektivitas

Efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. “Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan”. (Indra Bastian, 2006 : 77). Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat

efektivitas adalah rasio efektivitas. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan targetnya (Halim, 2008).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasar Potensi Riil}} \times 100\% \dots (3)$$

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, maka kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Kriteria Efektif Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yaitu pajak daerah khususnya penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar tahun anggaran 2008-2012. Objek penelitian ini dipilih karena mengingat penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan dalam Pendapatan Asli Daerah sangat tinggi dan oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data mengenai penerimaan PAD Kota Denpasar, data target dan realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan Kota Denpasar, serta anggaran biaya dan realisasi biaya yang dikeluarkan

dalam memungut pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Analisis kuantitatif digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh dalam menilai kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar atas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan *value for money*.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Kinerja dari sudut ekonomi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan atau prestasi yang tercapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang diukur dengan membandingkan anggaran biaya untuk memungut pajak hotel, restoran, dan hiburan dengan realisasi biaya untuk memungut pajak hotel, restoran, dan hiburan dari tahun 2008-2012.
2. Kinerja dari sudut efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang diukur dengan rasio efisiensi yang digambarkan dengan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak hotel, restoran, dan hiburan dengan realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan dari tahun 2008-2012.
3. Kinerja dari sudut efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan atau prestasi yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang diukur dengan rasio efektivitas yang digambarkan dengan menggunakan perbandingan antara realisasi penerimaan

pajak hotel, restoran, dan hiburan dan/atau dengan target penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan dari tahun 2008-2012.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk menilai kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar atas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan *value for money*. Perhitungan tersebut diuraikan dalam rasio ekonomi, efisiensi, dan efektifitas yang hasil dari rasio tersebut digunakan sebagai acuan untuk melakukan penilaian kinerja dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Ekonomi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2008-2012

Perhitungan rasio ekonomi dari kinerja penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar tahun 2008-2012 disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5.
Rasio Ekonomi atas Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2008-2012

Tahun	Anggaran Biaya Untuk Memungut PHR, dan Hiburan (Rp)	Realisasi Biaya Untuk Memungut PHR, dan Hiburan (Rp)	Rasio Ekonomi (100%)
2008	365.295.000	339.441.000	93
2009	330.000.000	284.329.500	86
2010	316.360.000	296.246.000	94
2011	338.260.000	269.014.000	80
2012	511.285.000	395.901.000	77
Rata-rata rasio ekonomi			86

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, 2013 (data diolah)

Tabel 5. memperlihatkan rata-rata rasio ekonomi Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2008-2012 adalah sebesar 86 %. Rata-rata rasio ekonomi Dinas Pendapatan daerah Kota Denpasar Tahun 2008-2012 yang ditunjukkan oleh tabel 5. tergolong ekonomis. Rata-rata tergolong ekonomis karena menunjukkan nilai rasio dibawah 100%. Rasio ekonomi Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2008-2012 memiliki nilai rasio ekonomi yang berfluktuasi. Nilai rasio ekonomi pada tahun 2008 sebesar 93% kemudian turun menjadi 86% pada tahun 2009. Tahun 2010 rasio ekonomi naik kembali hampir mendekati nilai 100% yang berarti hampir mendekati ekonomis berimbang dan kemudian turun lagi menjadi 80% di tahun 2011. Nilai ekonomis disini dapat diartikan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam penggunaan biaya cukup hemat dan tidak lebih dari target yang telah dianggarkan.

Analisis Rasio Efisiensi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2008-2012

Perhitungan rasio efisiensi secara absolut tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja organisasi sektor publik, karena terdapat berbagai program di dua unit kerja yang dapat dibandingkan dengan tingkat efisiensinya.

Kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai di bawah 60 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Berikut perhitungan rasio efisiensi dari kinerja penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar tahun 2008-2012 disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6.
Rasio Efisiensi Atas Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2008-2012

Tahun	Realisasi Biaya (Rp)	Realisasi Penerimaan PHR, dan Hiburan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2008	339.441.000	83.497.621.966	41	Sangat efisien (< 60%)
2009	284.329.500	106.266.975.092	27	Sangat efisien (< 60%)
2010	296.246.000	121.757.733.073	24	Sangat efisien (< 60%)
2011	269.014.000	138.491.687.042	19	Sangat efisien (< 60%)
2012	395.901.000	159.246.969.678	25	Sangat efisien (< 60%)
Rata-rata	316.986.300	121.852.193.936	26	Sangat Efisien (< 60%)

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, 2013 (data diolah)

Tabel 6. memperlihatkan rata-rata rasio efisiensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2008-2012 adalah sebesar 26 %. Sesuai dengan kriteria rata-rata rasio efisiensi Dinas Pendapatan daerah Kota Denpasar Tahun 2008-2012 tergolong sangat efisien. Rata-rata tergolong sangat efisien karena menunjukkan nilai rasio dibawah 60%. Rasio efisiensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2008-2012 tidak memiliki nilai rasio yang berfluktuasi. Persentase rasio

semakin efisien pada tahun 2011 yaitu sebesar 19%. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar semakin efisien dalam penggunaan biaya untuk memperoleh pajak hotel, restoran, dan hiburan.

Analisis Rasio Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2008-2012

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya diicipai. “Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*”. (Nordiawan dan Hertianti, 2010:160). Perhitungan rasio efektivitas dari kinerja penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar tahun 2008-2012 disajikan Tabel 7.

Tabel 7.
Rasio Efektivitas Atas Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2008-2012 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Target Penerimaan PHR, dan Hiburan (Rp)	Realisasi Penerimaan PHR, dan Hiburan (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2008	70.500	83.498	118,44	Sangat efektif (>100%)
2009	88.250	106.267	120,42	Sangat efektif (>100%)
2010	103.900	121.758	117,19	Sangat efektif (>100%)
2011	120.300	138.492	115,12	Sangat efektif (>100%)
2012	141.500	159.247	112,54	Sangat efektif (>100%)
Rata-rata	104.890	121.852	116,17	Sangat efektif (>100%)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, 2013 (data diolah)

Tabel 7 memperlihatkan rata-rata rasio efektivitas Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2008-2012 adalah sebesar 116,17 %. Sesuai dengan

kriteria kinerja keuangan rata-rata rasio efektivitas Dinas Pendapatan daerah Kota Denpasar Tahun 2008-2012 yang ditunjukkan oleh tabel 6 tergolong sangat efektif. Rata-rata tergolong sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 100%. Nilai rasio efektivitas yang ditunjukkan lima tahun terakhir merupakan kinerja yang sangat baik karena perolehan pajak hotel, restoran, dan hiburan sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Nilai rasio yang telah ditunjukkan patut dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan cara Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar lebih giat lagi dalam memungut pajak hotel, restoran, dan hiburan

Upaya yang Telah Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Seperti yang sudah disajikan sebelumnya, bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan dari tahun ke tahun. Dengan peningkatan PAD yang terus meningkat secara signifikan, Kota Denpasar dapat menyusun Program strategis dan menetapkan APBD setiap tahunnya dengan tepat waktu, sehingga Pemerintah Kota Denpasar memperoleh prestasi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mendapatkan insentif dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 26,6 miliar pada tahun 2010 (Dispenda Kota Denpasar, 2012). Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Kota Denpasar di bidang pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penyederhanaan proses perijinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan diharapkan akan mendorong investasi ke Kota Denpasar terus tumbuh dan

berkembang. Investasi ke Kota Denpasar yang terus berkembang nantinya akan memberikan kontribusi peningkatan penerimaan retribusi dan peningkatan jumlah usaha yang bisa didaftarkan dan ditetapkan sebagai wajib pajak daerah. Pada akhirnya akan memberikan kontribusi peningkatan penerimaan pajak daerah dan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja finansial Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan menggunakan konsep *Value for Money Audit* jika ditinjau dari sudut rasio ekonomi untuk pajak hotel, restoran, dan hiburan adalah tergolong ekonomis karena menunjukkan nilai rasio di bawah 100% yaitu sebesar 86%. Rasio ekonomi Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar pada tahun 2008-2012 memiliki nilai rasio ekonomi yang berfluktuasi.

Kinerja finansial Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan menggunakan konsep *Value for Money Audit* jika ditinjau dari sudut rasio efisiensi untuk pajak hotel, restoran, dan hiburan adalah tergolong sangat efisien karena menunjukkan nilai rasio di bawah 60% yaitu sebesar 26%. Rasio efisiensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2008-2012 tidak memiliki nilai

rasio yang berfluktuasi. Persentase rasio semakin efisien pada tahun 2011 yaitu sebesar 19%.

Kinerja finansial Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan menggunakan konsep *Value for Money Audit* jika ditinjau dari sudut rasio efektivitas untuk pajak hotel, restoran, dan hiburan adalah tergolong sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio di atas 100% yaitu sebesar 116,7%. Nilai rasio efektivitas yang ditunjukkan dari tahun 2008-2012 merupakan kinerja yang sangat baik karena perolehan pajak hotel, restoran, dan hiburan sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Prestasi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan dari tahun ke tahun dikarenakan terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikeluarkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan data biaya yang mencakup data biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) saja. Hasil rasio ekonomi dan rasio efisiensi menggunakan input biaya Bahan Bakar Minyak (BBM). Tidak ada pengalokasian biaya lain berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, sehingga penulis mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan menggunakan konsep *Value for Money Audit* jika ditinjau dari sudut rasio ekonomi dan efisiensi.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan evaluasi kinerja berdasarkan *value for money* dalam menilai kinerja Dinas Pendapatan Daerah. Penelitian selanjutnya, disarankan agar mencoba menggunakan model-model penilaian kinerja yang lain seperti *balance score card* dan lokasi penelitian diharapkan dapat memberikan data penggunaan biaya yang lebih lengkap, sehingga penulis akan mudah mengalokasikan penggunaan biaya untuk memungut pajak. Data penggunaan biaya yang lengkap dan akurat tersebut akan memberikan hasil rasio ekonomi dan efisiensi yang baik.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar perlu mengadakan evaluasi dalam penggunaan biaya yang dikeluarkan saat memungut pajak. Mengingat hanya biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) saja yang dikeluarkan, maka dalam penggunaannya harus lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Pengawasan terhadap biaya sangat diperlukan agar tidak terjadi pemborosan dan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif. Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar perlu mempertimbangkan kembali penetapan jumlah target penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan. Pertimbangan tersebut dapat dilihat dari kondisi jumlah wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan yang ada. Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar harus mempertahankan dan meningkatkan lagi prestasi pengelolaan keuangannya. Sangat penting untuk memberi perhatian lebih pada elemen-elemen yang mendukung penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan melihat ketiga penerimaan pajak tersebut yang paling mendominasi dalam pos penerimaan pajak daerah.

REFERENSI

- Barnett, C., Barr, J., Christie, A., Duff, B., Hext, S. 2010. Measuring the Impact and Value For Money of Governance & Conflict Programmes. www.dfid.gov.uk/r4d/PDF/Outputs/Mis_SPC/60797_ITAD-VFM-Report-Dec10-pdf. Diakses 3 Agustus 2012.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Damayanti, Theresia Woro. 2010. Federation Des Experts Comptables Europeens: Sebuah Alternatif Penilaian Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ekplanasi*. 15(2): h:1-12.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar. 2007-2011. *Data Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar*. Denpasar.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Dalam Negeri No. 690 900 327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi ke-1. Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nordiawan, Dedi dan Ayuningtyas Hertanti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugrahani, Tri Siwi. 2007. Analisis Penerapan Konsep Value for Money pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam *AKMENIKA UPY*. 1: h: 1-17.
- Aryana, Eka. 2009. Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan *Value for Money* untuk Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2004-2008. *Skripsi*. Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.

